

**IMPLEMENTASI SEMBOYAN HIDUP MESUJI OLEH
ANGGOTA DPRD KABUPATEN MESUJI**



Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S,Sos)**

**Nama
Deri**

1431040016

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
2018/1440 H**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SEMBOYAN HIDUP MESUJI OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MESUJI

Oleh :
DERI

Semboyan merupakan suatu falsafah hidup bagi setiap warga masyarakat yang mendiami suatu wilayah teritorialnya. Baik setiap Negara, Provinsi ataupun Pemerintahan daerah memiliki semboyan hidup untuk pegangan dan menjunjung tinggi suatu identitas suatu daerah. Sebagai cerminan dalam pemerintahan daerah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji harapannya dapat menjadi contoh dalam mengimplemetasikan semboyan hidup yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang lambang daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi semboyan Mesuji oleh anggota DPRD kabupaten Mesuji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Mesuji yang berjumlah 35 orang dan yang dijadikan sampel 5 anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari masing – masing fraksi, diantaranya PDIP, Nasdem, PKS, Hanura dan Demokrat. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasahnya pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup masyarakat yang ada di Mesuji yang masih kurang. Hal tersebut di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang semboyan hidup tersebut. Semboyan hidup yang awalnya berbunyi Sai Bumi Serasan Segawe telah diubah menjadi Bumi Ragab Begawe Caram yang belum banyak diketahui oleh masyarakat mesuji pada saat ini. Implementasi semboyan hidup kabupaten mesuji ditinjau dari fungsinya sebagai legislator telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan ikut mengimplementasikan semboyan hidup masyarakat mesuji dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat, fungsinya sebagai anggaran yang mendsistribusikan sumber daya lokal yang berbentuk angka belum cukup sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dan sebagai pengawas anggota DPRD Kabupaten Mesuji tidak hanya mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tentang semboyan hidup dalam masyarakat namun juga ikut mengimplementasikan semboyan hidup yang berbunyi Bumi Ragab Begawi Caram tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)

703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Semboyan Hidup Mesuji Oleh Anggota DPRD
Kabupaten Mesuji**

Nama : Deri

NPM : 1431040016

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Drs. Effendi, M. Hum
NIP.195807211986031004

Pembimbing II

Abdul Oohar, M. Si
NIP.197103122005011005

Ketua Jurusan

Dr. Nadirsah Hawari, M.A
NIP.197406282008011013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)

703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI SEMBOYAN MESUJI OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MESUJI**, disusun oleh Deri, NPM 1431040016, Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu 19 September 2018, di Ruangan Munaqasyah (Gedung Dekanat Lt.3) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua

: Dr. Himyari Yusuf, M. Hum

(.....)

Sekretaris

: Tin Amalia Fitri, M. Si

(.....)

Penguji I

: Dr. Nadirsah Hawari, M.A

(.....)

Penguji II

: Drs. Effendi, M. Hum

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag

NIP. 195808231993031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS : Al- Maidah ayat 2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Arpan (almh) dan Ibunda Elmani tercinta yang telah mengasuh menyayangi, mendidik dari kecil hingga dewasa yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis, berkat doa restu kedua orang tua dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakak Mores dan adikku hendri serta mbak iparku Tati Arisanti terima kasih atas dukungan dan suportnya atas selama ini.
3. Bapak Drs. Effendi, M. Hum selaku pembimbing 1 dan bapak Abdul Qohar, M. Si selaku pembimbing 2 yang telah dengan susah payah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Teman – teman seperjuangan di angkatan 14 khususnya jurusan Pemikiran Politik Islam terima kasih atas kegilaan dan kekompakan yang sering kita jalani selama kita kuliah.
5. Sahabat seperjuangan KKN kelompok 135 Desa. Mandalasari Kab. Lampung Selatan, terimakasih atas kebersamaan kalian selama 40 hari yang telah memberikan nilai kekeluargaan dan kekompakan hingga saat ini, semoga niat dan usaha kalian tercapai dan dipermudah dalam segala urusan, Amin.
6. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin Cabang Bandar Lampung. Terima kasih banyak untuk kanda, maupun

yunda yang telah memberikan ilmu – ilmunya sehingga dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran untuk penulis, dan menjadi bekal penting penulis demi menjalankan tugas utama selaku kader HMI dan kader umat. Agar dapat merealisasikan dari tujuan terbinannya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

7. Buat sahabat-sahabatku Yogi Kurniawan, Imam Wahyudin, Muhammad Sidiq, Fajar Setiadi, Ari Ginanjar dan Imam Ibnu koirul Sidiq yang telah memberikan suport dan bantuan selama ini.
8. Monica Afrilla, S. Psi yang selalu memberikan semangat lebih, nasehat, motivasi sehingga penulis memiliki semangat juang tinggi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan menyelesaikannya study dengan target waktu yang di harapkan.
9. Buat abang – abang kusayang yang pertama Afen Sandika, S.Sos, Herianda Nurfa, S. Sos, Beni Iswanto, S. Sos, Edy Supryono, S.Sos yang telah memberikan bantuan dan suport selama ini.
10. Para Dosen dan staf yang ada di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengamalan yang tidak bisa dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Deri dilahirkan di kampung yang sangat terpencil pada tanggal 2 juni 1995 kampung yang terletak di perbatasan antara sumatera selatan dan lampung kampung sungai badak namanya kampung yang termasuk salah satu dari kesembilan kampung tua yang ada di kabupaten mesuji. Kabupaten Mesuji adalah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang mekar menjadi 3 Kabupaten yaitu Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji pada tahun 2009. Kabupaten Mesuji sendiri itu mempunyai 7 Kecamatan dengan 114 desa. Dilahirkan dari rahim sesorang ibu yang bernama elmani dan di besarkan dengan penuh kasih sayang tanggung jawab oleh Alm yang Arpan merekalah penyemangat hidupku.

Saya adalah anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. Ketika 2002 saya mengenyam pendidikan dasar pada usia 7 tahun di SDN I sungai badak dan berhasil menyelesaikan sampai tahun 2008, ketika pada tahun 2008 saya melanjutkan ke jenjang SMPN 2 Mesuji Lampung dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2011, pada tahun 2011 saya melanjutkan ke SMA yaitu SMAN I MESUJI dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2014, pada tahun 2014 saya melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi pilihannya adalah IAIN Raden Intan Lampung dan di terima di Fakultas Ushuludin di Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Bandar lampung, 20 September 2018

Penulis,

Deri

NPM : 1431040016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggemam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al- Quran dan Hadist. Penulis skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk menggelar Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Fakultas Ushuddin dan Studi – Studi Agama UIN Raden Intan Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi – Studi Agama UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A Selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Tin Amalia, M. Si Selaku Sekertaris Jurusan Politik Iislam.
4. Bapak Drs. Effendi, M. Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Abdul Qohar, M. Si selaku pembimbing 2 yang telah dengan susah payah

memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi – Studi Agama yang telah memberikan ilmu – ilmunya dan motivasi penulis dalam menyelesaikan Fakultas Ushuluddin dan Studi – Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Karyawan dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi – Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 September 2018

Penulis

Deri

NPM : 1431040016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
ABSTRAK.	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.	1
B. Alasan Memilih Judul.	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Metodologi Penelitian	9
H. Tinjauan Pustaka	15
BAB II IMPLEMENTASI SEMBOYAN HIDUP OLEH	
ANGGOTA DPRD	
A. Implementasi Kebijakan	
1. Pengertian Implementasi	17
2. Teori – Teori Implementasi	18
3. Tahap Implementasi Kebijakan	20
B. Pengertian Semboyan Hidup	
1. Pengertian semboyan	24
2. Pengertian ciri- ciri semboyan	25
C. Pengertian Anggota DPRD	
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25

2. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26
3. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27
4. Syarat – syarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29
5. Otoritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30
D. Hubungan antara Semboyan Hidup dengan kinerja DPRD	34

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MESUJI DAN ANGGOTA

DPRD KABUPATEN MESUJI

A. Profil Daerah Mesuji.	36
1. Sejarah Kabupaten Mesuji.	37
2. Kondisi Geografis dan Demografi.	41
3. Kondisi Sosial dan Ekonomi	45
B. Sejarah Semboyan Hidup Masyarakat Mesuji	49
C. Anggota DPRD Kabupaten Mesuji	51
D. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD.	54

BAB IV SEMBOYAN HIDUP MESUJI OLEH ANGGOTA

DPRD

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Semboyan Hidup Masyarakat Mesuji.	59
B. Implementasi Semboyan Hidup Mesuji Oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	66
B. Saran.	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penyusunan Skripsi dibutuhkan arahan yang jelas agar alur penelitian ini lebih terfokus dan terarah. Judul Skripsi ini adalah “ *Implementasi Semboyan Hidup Mesuji Oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji* “. Maksud judul Skripsi tersebut dapat ditegaskan sebagai berikut :

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.¹ Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran itu sendiri.

Semboyan Hidup adalah kumpulan kata – kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar, tuntunan, intisari, slogan dan motto dari suatu usaha bersama yang membangkitkan semangat ciri khas dari pemilik semboyan yang bersangkutan. Semboyan Bumi Ragab Begawe Carem adalah semboyan hidup dari masyarakat yang diambil dari bahasa Mesuji yang memiliki makna Kabupaten Mesuji yang dihuni oleh masyarakat yang bekerja cepat, damai dan gotong royong.²

¹Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3- cet 2.

² Buya Hamka, *Falsafah Hidup*,(Yogyakarta : Gema Insani Press, 1997), h.15.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.³ Kabupaten mesuji memiliki 35 anggota.

Kabupaten Mesuji ialah daerah yang tidak terlepas dari sejarah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1865, Sirih Pulau Padang Kayuagung. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu sangat luas dan lokasi Kabupaten Mesuji masih Kecamatan Mesuji. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang terlampau jauh dari pusat Pemerintahan di Menggala maka atas dasar percepatan dan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan serta keterjangkauan pelayanan umum maka Kabupaten Mesuji terpecah dari Kabupaten Tulang Bawang adalah 218,400 Ha. Sedangkan jumlah penduduknya adalah 189, 999 jiwa pada tahun 2006. Kabupaten Mesuji adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Mesuji merupakan dengan jarak terjauh dari Bandar Lampung, Ibukota Lampung. Serta berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.⁴

Dapat saya simpulkan dari pemaparan diatas dan beberapa istilah yaitu permasalahan tentang judul Skripsi yang saya angkat adalah Implementasi Semboyan Hidup Hidup Mesuji oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji. Sebuah praktek cerminan semboyan hidup mesuji” Bumi Ragab Begawe

³ Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Grasindo, 1992). h. 23

⁴ Nurdin Vivit Bartoven , *Etnografi Marga Mesuji*, 2012. h . 34

Carem'' yang diambil dari Bahasa Mesuji yang memiliki makna Kabupaten Mesuji yang dihuni oleh masyarakat yang bekerja cepat, damai dalam kebersamaan dan gotong royong yang seharusnya mampu di implementasikan oleh DPRD Kabupaten Mesuji.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti memilih judul tersebut diatas adalah :

1. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup masyarakat mesuji yang berbunyi Bumi Ragab Begawe Caram yang memiliki makna Kabupaten Mesuji yang dihuni oleh masyarakat bekerja cepat, damai dalam kebersamaan dan gotong royong.
2. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni yaitu pemikiran politik islam (PPI), selain itu dengan litelatur yang cukup memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
3. Penelitian yang dijangkau dengan lokasi rumah penulis sehingga biaya yang dikeluarkan tidak berlebihan karena akan mempermudah dalam melakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Semua tingkah laku dan aturan serta Undang – Undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan.

Setiap manusia mempunyai pandangan hidup itu bersifat kodrati karena itu ia akan menentukan masa depan seseorang untuk dijelaskan pula arti pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia dan di masyarakat.

Manusia dengan semboyan hidup tidak bisa dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena tanpa semboyan hidup seseorang manusia tidak memiliki sesuatu yang disebut dengan pandangan atau pedoman hidup yang membuat seseorang tersebut menjadi manusia seutuhnya. Dengan memiliki tujuan yang dituju manusia akan berusaha sekuat mungkin yang membuat dia memiliki banyak pengalaman sehingga membuat seseorang bisa menghadapi persoalan yang besar.⁵

Pada awalnya semboyan masyarakat Mesuji yaitu sai bumi serasan segawe yang bermakna daerah yang dihuni oleh masyarakat yang damai dalam kebersamaan dan gotong royong. Setelah diadakan sidang oleh anggota DPRD Mesuji dan tokoh-tokoh berpengaruh di Mesuji maka semboyan tersebut mengalami perubahan menjadi Bumi Ragab Begawe Caram. Perubahan tersebut disebabkan adanya usulan – usulan dan koreksi dari para tokoh – tokoh masyarakat Kabupaten mesuji dan merupakan dari sebuah kajian – kajian dari para anggota DPRD di mesuji.

Semboyan yang lama telah dikoreksi awalnya terdapat di sebuah gambar pohon kelapa sawit namun karena menurut para tokoh masyarakat

⁵ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD Paradigma Reformasi*, (Surabaya Rajawali Pers, 2006). h. 35.

gambar pohon kelapa sawit tidak bisa untuk di jadikan sebuah lambang, karena sifatnya berubah – ubah. Hal tersebut disebabkan jika dikemudian hari atau pun masa yang akan datang ketika sebuah pohon kelapa sawit dan pohon karet sudah tidak tiada lagi ataupun sudah tidak dibudidayakan lagi daerah mesuji maka hal itu pun tidak relevan lagi, maka dari itu diadakan sebuah perumusan untuk perubahan semboyan yang baru.

Semboyan masyarakat mesuji yang baru adalah Bumi Ragab Begawe Caram yang mempunyai makna dan arti Bumi sebagai tempat tinggal, Ragab adalah yang telah di huni, Begawe adalah bekerja cepat dan Caram adalah damai. Maka makna dari Bumi Ragab Begawi Caram adalah Kabupaten Mesuji yang telah di huni ataupun di tempat tinggal oleh seluruh rakyat yang telah bekerja cepat, damai, dalam suatu kebersamaan yang bersifat gotong royong.

Dengan dibentuknya semboyan yang baru telah adanya melalui persetujuan bersama antara pemerintahan Kabupaten ini dengan persetujuan dari pihak DPRD Mesuji. Pergantian semboyan ini pun muncul karena adanya suatu usulan – usulan dari berbagai tokoh – tokoh masyarakat mesuji dan menyesuaikan dengan kearifan / kerukunan yang sangat lokal di Kabupaten Mesuji.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila yang secara *artificial* dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran baik dalam peran maupun fungsi

eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun di perankan oleh eksekutif.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam Pemerintahan namun dalam realitasnya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dimana seringkali kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan / diputuskan oleh Pemerintahan sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.⁷

Menguatnya peran DPRD dimana di era reformasi dan otonomi daerah saat ini yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam kontrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan – tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintahan daerah. Sampai saat beberapa waktu yang lalu hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan untuk memberikan suatu suara untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan telah membatasi hanya sekelompok orang kecil yang berkuasa.

⁶ Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta 2005) 20.h 56.

⁷ Sadu Wasistono, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, (Bandung Fokusmedi, 2009), h. 76.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dari DPRD Kabupaten Mesuji dalam membentuk Peraturan Daerah belum sesuai dengan semboyan hidup dan karakter masyarakat Mesuji yang digambarkan dalam semboyan hidup seperti Bumi Ragab Begawe Caram yang mana semboyan tersebut mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengedepankan tata krama dan gotong royong secara bersama – sama.

Pemerintahan Kabupten Mesuji bersama DPRD setempat meyepakati usulan sembilan Peraturan Daerah (RAPERDA) dalam program pembentukan Perda Kabupaten Mesuji.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelumnya melaksanakan pelaksanaan Rapat Paripurna Pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji terhadap rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Program pembentukan daerah yang di sahkan ini sebanyak enam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mesuji.
2. Raperda tentang susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
3. Raperda tentang penyelidikan pegawai negeri sipil.
4. Raperda tentang kawasan tanpa rokok.
5. Raperda tentang ketertiban umum.
6. Raperda tentang pembentukan badan usaha milik daerah.

Keeenam Raperda yang disampaikan pada kesempatan ini telah didasarkan atas skala prioritas dan telah melalui tahapan penelitian. Penetapan

anggaran pembangunan di Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh birokrasi politik yang ada di Mesuji belum dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat Mesuji. Pengawasan terhadap perturan daerah tidak maksimal dapat dilihat dari proses pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di Kabupaten Mesuji. Dari beberapa masalah yaitu bagaimana implementasi semboyan hidup oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji dan apakah ada faktor – faktor yang mempengaruhi semboyan mesuji oleh anggota DPRD Kabupaten Mesuji

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berusaha menjawab persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup Kabupaten Mesuji ?
2. Bagaimana implementasi semboyan hidup oleh Anggota DPRD ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi semboyan hidup oleh Anggota DPRD dalam konteks tugas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan pada jurusan pemikiran politik islam khususnya dalam memperkaya informasi tentang implementasi semboyan hidup Mesuji oleh anggota DPRD Kabupaten Mesuji.
2. Menambah kontribusi dalam pengembangan wacana berfikir dan sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Mesuji tentang implementasi semboyan hidup Mesuji oleh anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis. Untuk hal tersebut maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan mengangkat data yang ada dilapangan. Adapun data – data lapangan adalah data – data yang berkaitan

dengan sejarah semboyan hidup masyarakat mesuji yang di Kabupaten Mesuji.⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan serta menggambarkan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi obyektif dilapangan.⁹ Jadi penelitian ini menggambarkan sifat – sifat suatu individu, gejala – gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Abdurrahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang pertama.

¹⁰Sumber data Primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview atau wawancara. Seperti kejadian dilapangan yang berhubungan dengan implementasi semboyan hidup Mesuji oleh anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

⁸Singarudin. Masri dan Sofian, Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Pustaka Lp3es Indonesia Jakarta 1980), h. 89

⁹ Prasatya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Setiawan Pers, 1999), h. 60.

¹⁰ Abdurraman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta 2006), h. 38.

b. Data Sekunder

Data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengelola dan menyajikan.¹¹ Data Sekunder disebut dengan data yang tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku – buku, literature, karya – karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang dilapangan tidak sempurna tidak ditunjang dengan data kepustakaan dengan mempergunakan kedua data tersebut maka data yang berhimpun dapat memberikan validitas dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas atas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian ini populasi akan dijadikan objek adalah anggota DPRD yang ada di Kabupaten Mesuji.¹²

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kabupaten Mesuji yang berjumlah 35 orang yang terdiri dari berbagai partai dan terbagi menjadi beberapa komisi.

63. ¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gama Press, 1987, h.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 117.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga mempunyai karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang bisa dianggap mewakili populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan peneliti adalah teknik sampling bola salju yaitu pengumpulan data yang dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel.¹³

Sampel pada penelitian ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Mesuji berjumlah 5 orang yang terdiri dari Eddy Sandani yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Faisal. SH dari Partai Hanura Periode 2014 – 2019, Weli Apriyani dari Partai Demokrat periode 2014- 2019, Ketua Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrruloh dari partai Nasdem dan Bob Nasution yang berasal dari Partai PDI Perjuangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Data usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh

¹³ *Ibid*, h.118.

indera.¹⁴ Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena – fenomena yang nampak dalam penelitian. Di samping itu juga data menyaring data yang tidak obyektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui wawancara.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara menurut Usman dan Purnomo Setiady Akbar yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁵ Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan langsung kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah (*guided interview*) dimana penelitian menanyakan kepada subyek yang akan diteliti berupa pertanyaan – pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Hal ini barulah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.¹⁶ Data – data yang digali melalui wawancara ini adalah data – data tergambar dalam fokus penelitian sebagaimana dalam rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai anggota DPRD Eddy Sandani dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mewawancarai anggota DPRD Faisal

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002).h. 81.

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Seti ady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara : Jakarta, 2001), h. 27.

¹⁶ Wiratni Sujarweni, *Op. Cit*, h. 32

dari Partai HANURA dan Weli Apriyani dari Partai Demokrat , Fuad Amrruloh dari Partai Nasdem dan Bob Nasution dari Partai PDI Perjuangan .

Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar – benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.

Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai yang ikut berperan dalam pemikiran politik islam.

c. Metode Dokumentasi

Sebagai obyek yang diperhatikan dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan kertas atau orang (people).¹⁷ Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang – barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda – benda tertulis buku – buku, majalah, dokumen dan peraturan – peraturan.

¹⁷ Robert. K . Yein, *Studi Kasus Desain Metode*(Jakarta, Raja Grafindo Persada 1996), h. 103- 105.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu digambarkan dengan kata – kata atau kalimat, kemudian dipisah – pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.¹⁸

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu berangkat dari fakta – fakta yang khusus, peristiwa – peristiwa yang konkrit kemudian fakta – fakta atau peristiwa – peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi – generalisasi yang mempunyai sifat umum.

H. Tinjauan Pustaka

Dalam kepustakaan yang membahas tentang Implementasi Semboyan Hidup Mesuji oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, pernah ditulis dalam suatu penelitian atau merupakan bagian dari penelitian atau tulisan sebagaimana dalam beberapa tulisan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat terhadap parmalin di Desa Huta Tinggi Kecamatan Lagubuti Kabupaten Toba Samosir oleh Vina Notriani Siregar Program Studi Fakultas Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1993),h. 132

Universitas Negeri Semarang 2015 yang mengurai tentang pandangan hidup masyarakat terhadap parmalin Kabupaten Toba Samosir.

2. Eksistensi Falsafah *jou se ngofa ngare* diternate oleh Imamanunudin Ayub Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang mengurai falsafah hidup orang ternate.

Jika dilihat dari judul diatas ada sedikit persamaan dengan judul penelitian saat ini, yaitu sama – sama membahas tentang semboyan hidup, perbedaan kedua judul diatas membahas tentang pandangan masyarakat terhadap parmalin dan eksistensi falsafah *jou se ngofa ngare*, sedangkan judul penelitian ssat ini membahas tentang implementasi semboyan hidup mesuji oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.



BAB II

IMPLEMENTASI SEMBOYAN HIDUP OLEH ANGGOTA DPRD

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah kejadian yang nyata akibat dari hal yang dibuat dengan tujuan tertentu baik menertibkan, menyejahterakan maupun mencegah serta menggulangi permasalahan yang terjadi yang selaras dengan pendapat Daniel A. Maznian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan. Yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman – pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadminstrasikan maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.¹⁹

Pendapat lain menyatakan implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut menyiapkan sumber daya guna menggerakan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana – prasarana. Sumber daya keuangan dan tentu saja menetapkan siapa yang bertanggung jawab

¹⁹ Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2005),h. 23.

melaksanakan kebijakan tersebut serta bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kepada masyarakat.²⁰ Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan maka usaha – usaha implementasi akan melibatkan berbagai industri seperti birokrasi kabupaten, kecamatan dan pemerintahan desa.²¹ Disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa setiap kebijakan yang akan di realisasikan kepada masyarakat harus memiliki komponen yang lengkap. Dan hal yang menyangkut pemerintahan desa bukan merupakan hal yang sederhana namun urusan mengenai desa hal yang sangat penting karena kesuksesan suatu kebijakan dapat diukur keberhasilannya dengan cara melihat keberhasilan kebijakan anggota DPRD sebagai pengesah semboyan masyarakat mesuji dan yang bersentuhan langsung mengsosialikan semboyan tersebut kepada masyarakat langsung.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah – langkah yang di perhatikan guna untuk membuat sebuah kebijakan yang maksimal dalam perealisasiannya maka dari itu setiap bagian merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh untuk memaksimalkan sebuah kebijakan.²² Terdapat 4 poin penting yaitu :

²⁰ Syukani. Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar . cet III.2003),h. 67.

²¹ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : Grasindo. 2007).h. 14.

²² Edward III. George C. *Implementing Public Policy*. (washington : Cogrrsional Quaerterly Inc. 1980).h. 146.

➤ Komunikasi

Implementasi akan terlaksana secara maksimal apabila mengkomunikasikan hal – hal terlebih dahulu karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran dan dapat menyebabkan kegagalan dalam merealisasikan suatu kebijakan.

➤ Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal yang sangat penting karena walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial / dana.²³

➤ Disposisi

Kejujuran merupakan hal yang pokok dalam mensukseskan sebuah kebijakan karena disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda

²³ Dedy Mulyana. *Ilmu Komunikasi. Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya 2008).
h. 28.

dengan pembuat kebijakan.²⁴ Maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif dan disposisi ini juga terindikasi ada pada semboyan hidup oleh anggota DPRD.

➤ Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP).²⁵ SOP menjadi pedoman bagi masyarakat implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red – tape yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.²⁶ Dan dari teori ini penulis dapat mendapatkan dan menentukan data lebih mudah menentukan apakah semboyan tersebut dilaksanakan oleh anggota DPRD yang memiliki wewenang dan struktur yang baik terhadap masyarakat.

3. Tahap Implementasi Kebijakan

Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Di tahap implementasi kebijakan ini akan dapat dipahami bagaimana kinerja dari suatu kebijakan. Bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana

²⁴ Dunn William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi ke III). (yogyakarta : Universitas Gajah Mada. 2009).h. 72.

²⁵ Lukman. Sampara. *Manajemen kualitas pelayanan*. (Jakarta : STIALAN Press. 2000).h. 50.

²⁶ Wahab. Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijakan negara*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2005).h.4.

sejumlah faktor yang berasal lingkungan baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan budaya dan lingkungan masyarakat. Implementasi kebijakan antara lain :²⁷

- Standar dan Tujuan Kebijakan (*policy standards objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor – faktor yang menentukan hasil dari kerja maka identifikasi indikator – indikator hasil kerja merupakan hal yang sangat penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan ini terbukti karena mudah dikur dalam berbagai kasus.

- Sumber Daya Kebijakan (*policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan. Tetapi juga menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi dana dan intensif yang diharapkan dapat implementasi yang efektif.

- Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program di pahami individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks penyampaian informasi kebawah pada satu organisasi atau organisasi atau organisasi yang kesatu organisasi yang lainnya mau atau tidak komunikator baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme

²⁷ Agus eko sujianto. *Aplikasi statistik dengan SPSS 16.0* (Jakarta : Prestasi. 2009).h.35.

dan prosedur institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

- Karakteristik Pelaksana (*the characteristics of the implementing agencies*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawasan kontrol hirarki terhadap keputusan – keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumber daya pelaksanaan validitas organisasi tingkat komunikasi terbuka yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan hubungan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

- Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh eksopol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama. Walaupun dampak faktor ini sedikit mendapat perhatian tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktifitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor eksopol yaitu :

- a. Apakah sumberdaya – sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksanaan cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi – kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- c. Bagaimana sifat umum seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.

- d. Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- e. Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

- Disposisi atau Sikap Pelaksanaan

Elemen ini menyangkut masalah – masalah persepsi –persepsi pelaksanaan dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kognisi (pemahaman dan pengetahuan). Arah repon pelaksanaan terhadap implementasi menerima atau menolak dan intensitas dari respon pelaksana.

Elemen – elemen yang diutarakan oleh Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi menunjukan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri tetapi juga ada unsur – unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran dengan demikian akan ada keseimbangan yang menunjukan keserasian antara program yang dibuat untuk dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Pendapat lain mengatakan bahwa keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan dan siap pelaksana program. Sementara itu situasi implrmentasinya merupakan kekuasaan terpenting dan aktor yang terlibat karakteristik lembaga penguasa dan keputusan dan daya tanggap.

B. Semboyan Hidup

1. Pengertian Semboyan

Semboyan dalam KBBI adalah kalimat minor atau lengkap yang terjadi dari frase atau klausa yang disukai oleh suatu kelompok masyarakat, dan juga kata-kata atau kalimat pendek yang dipakai untuk membangkitkan semangat dan merupakan ciri khas dari pemilik semboyan yang bersangkutan.²⁸ Semboyan merupakan suatu falsafah hidup bagi setiap warga masyarakat yang mendiami suatu wilayah teritorialnya. Baik setiap Negara, Provinsi ataupun Pemerintahan daerah memiliki semboyan hidup untuk pegangan dan menjunjung tinggi suatu identitas suatu daerah.

Menurut Rohiman bahwa terkandung konsep dasar dan nilai-nilai mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa serta terkandung pikiran-pikiran yang terdalem mengenai wujud suatu bangsa. Atau merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai yang dimilikinya sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.²⁹ Artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.

²⁸ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2010).h. 34.

²⁹ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996, h. 138

2. Ciri – ciri semboyan hidup :

- a. Sebuah frasa, kata – kata, kalimat dan motto
- b. Sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan tertentu
- c. Terdiri dari beberapa kata singkat, menarik dan mudah diingat
- d. Didalam terdapat ajakan atau informasi tersirat
- e. Bisa berupa motto atau semboyan individu maupun kelompok³⁰

C. Pengertian Anggota DPRD

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Mereka yang terpilih sebagai anggota DPRD / DPD dan DPRD adalah yang memperoleh suara terbanyak disetiap dapilnya. Karena itu para wakil rakyat tersebut seharusnya menjadi corong keinginan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD berada di setiap daerah di Indonesia. Anggota DPRD berjumlah 35 – 100 orang. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. DPRD

³⁰ ([http : // posterina. Blogspot. Com/2014/09/ pengertian – slogan –tujuan –serta – ciri – ciri](http://posterina.blogspot.com/2014/09/pengertian-slogan-tujuan-serta-ciri-ciri)

merupakan mitra kerja Gubernur (Eksekutif), sejak diberlakukannya undang – undang nomor 32 tentang pemerintahan daerah, gubernur tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada.³¹

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah,³² yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undang lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.³³ Tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan *cek and belence* lembaga diluar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan.

2. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,³⁴ di provinsi/ kabupaten/ kota di indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

³¹ M. Djadjono Efrisa, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta, 2011),h.1.

³² Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³³ Pasal 42 ayat 1 poin c Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁴ Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diatur lebih lanjut dengan undang – undang terakhir pada BAB VI Undang – undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat.³⁵

Pada BAB VI Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas mengatur tentang susunan, fungsi, fraksi, alat kelengkapan, pelaksanaan hak DPRD, pelaksanaan hak anggota, persidangan dan pengambilan keputusan, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara.³⁶

3. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengalami peningkatan posisi yang strategis sebagai lembaga penampung, penyalur sekaligus representasi aspirasi masyarakat di daerah. sedangkan dalam kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat ditemukan dalam pasal 342 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Masuknya DPRD dalam komposisi penyelenggaraan

³⁵ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁶ *Ibid.* h.34.

pemerintahan di daerah memberikan penjelasan bahwa dikotomi yang mengarah oposisi peran antara kepala daerah dan DPRD mulai di hindari.³⁷

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintahan daerah dalam otonomi daerah sebenarnys tidak sulit untuk dipahami , karena dengan meperhatikan fungsi – fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja sudah ditemukan pola hubungan yang terbangun itu. Apalagi jika kita dilihat dari sudut yang lebih politis dan ideologis, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi rakyat dan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik,maka hubungan antara kedua instusi ini menjadi sebuah keharusan dalam negara demokrasi, di samping kedudukannya sebagai deskripsi akan sistem penyelenggaraan pemerinthan daerah.

Dinamika hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pelayanan publik di daerah terbagi dalam tiga pola hubungan yakni dominasi eksekutif, dominasi legislatif dan hubungan yang seimbang. Pola hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif adalah terjadinya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut, namun hal itu akan sangat bergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah akan semakin seimbang. Sebaliknya, semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara, maka yang tercipta dua

³⁷ Khairil Anwar, et al., “*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo*”, *Reformasi*, No. 2, Vol. 5 (2015),h. 4.

kemungkinan yaitu dominasi eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik.³⁸

4. Syarat-syarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB VII, bagian kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan setidaknya sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21(dua puluh satu tahun)
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sekolah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara

³⁸ *Ibid.h*, 3

5. Otoritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD (tugas, fungsi dan wewenang)

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibatasi pada pengawasan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Mengacu pada paragraf ketiga tugas dan wewenang DPRD yang termaktub pada pasal 42 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.³⁹

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang lain, seperti mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/ Kota, memilih wakil kepala daerah dalam hal kekosongan jabatan wakil kepala daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian

³⁹ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004...

internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah, melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.⁴⁰

Sedangkan dalam segi fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di pemerintahan pusat yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. lebih lanjut, revitalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dicermati dari Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda), penyusunan anggaran dan pengawasan sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 41 :

DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ayat (2) menjelaskan ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/ kota.⁴¹ Adapun fungsi lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengisian lowongan, pemotivasian dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Khairil Anwar, et al., “*Fungsi Dewan Perwakilan...*, 4.

pemimpinan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.⁴²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah mempunyai suatu hubungan linier di antara keduanya yaitu hubungan pengawasan yang dimiliki baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai kelembagaan yang mencerminkan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma – norma dan peraturan perundang – undangan serta pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau yang di gariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi.⁴³

Kemudian dari hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak, yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja dengan kepala daerah atau perangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak menyelidiki serta melakukan kunjungan ke lapangan, dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjut dari hubungan pengawasan itu adalah hubungan pertanggungjawaban. Hal tersebut tercermin dalam pasal 43 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.⁴⁴

Pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol. Pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu

⁴²Hidayat, “Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang. Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi(JIMIA).h.*

⁴³ M. Agus Santoso, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, Jurnal Hukum*, No. 4 (Oktober, 2011),h. 612.

⁴⁴ *Ibid.* h.34.

dengan saksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dengan demikian, manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu untuk melakukan *cross check* apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari pengawasan tersebut.⁴⁵

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian sebagai operasional dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁶

Fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyeimbang dari kekuasaan kepala daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh undang-undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan

⁴⁵ *Ibid*, h. 611.

⁴⁶ *Ibid*, h. 613.

tugasnya dalam rangka menyejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan kewenangan agar tidak terjadi *abuse of power* yang pada akhirnya berimplikasi pada kerugian negara.⁴⁷

D. Hubungan antara Semboyan Hidup dengan Kinerja DPRD

Semboyan merupakan suatu falsafah hidup bagi setiap warga masyarakat yang mendiami suatu wilayah teritorialnya. Baik setiap Negara, Provinsi ataupun Pemerintahan daerah memiliki semboyan hidup untuk pegangan dan menjunjung tinggi suatu identitas suatu daerah. Semboyan hidup dapat dijadikan pegangan, pedoman, arahan, ataupun petunjuk hidup suatu daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam penelitian ini diketahui semboyan masyarakat Mesuji adalah Bumi Ragab Begawe Caram yang memiliki makna bahwa Kabupaten Mesuji dihuni oleh masyarakat yang bekerja cepat, damai dan gotong royong. Semboyan kabupaten mesuji ini telah disetujui secara bersama oleh pemerintah Kabupaten

⁴⁷ *Ibid*,h.614.

Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji dengan peraturan daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2011 tentang lambang daerah.

Dengan dibentuknya semboyan Kabupaten Mesuji yang dirumuskan oleh anggota DPRD Kabupaten Mesuji, para wakil rakyat tersebut harus bisa menjadi panutan dan menjadi contoh bagi masyarakat yang ikut mengimplementasikan semboyan tersebut dalam fungsi dan kinerjanya sebagai wakil rakyat. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dicermati dari Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda).

Hubungan antara semboyan hidup dan kinerja DPRD dapat diketahuinya dari sejauhmana anggota DPRD ikut mengimplementasikan semboyan hidup yang telah di sahkan. Dalam Fungsi dan kinerjanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyeimbang antara pemerintah dan rakyat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mengsejahterakan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kinerjanya ikut peran dalam mengimplementasikan semboyan hidup masyarakat Kabupaten Mesuji tentu saja mengerti bahwa setiap dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebagai pembuat peraturan daerah namun juga sebagai pelaksana agar tidak terjadi kesenjangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MESUJI DAN ANGGOTA DPRD

A. Profil Daerah Mesuji

Secara administratif Kabupaten Mesuji terbentuk berdasarkan peraturan dan perundang – undangan tahun 2008 sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang merupakan penantian panjang masyarakat Mesuji bagi terwujudnya sebuah Kabupaten baru yang mandiri dalam berbagai bidang, karena wilayah Mesuji memiliki sumber daya alam yang memadai dan pengelolaan sumber daya tersebut belum mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintahan Provinsi maupun dari Pemerintahan Pusat.

Sehingga secara resmi Kabupaten Mesuji berdiri pada tanggal 3 April 2009 bersamaan dengan disahkannya undang – undang nomor 49 tahun 2008, sementara pelantikannya anggota DPRD telah dilaksanakan pada 23 april 2010. Sejak berdirinya Kabupaten Mesuji, Kabupaten ini telah dipimpin oleh tiga orang pejabat (Pj) Bupati yang diusulkan oleh Gubernur Lampung dan ditetapkannya oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Drh. Husodo Hadi untuk periode awal hingga Oktober 2009.

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 di gantikan oleh Drs. Ruswandi Hasan hingga juli 2011, karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Mesuji periode 2011- 2016, Drs. Ruswandi Hasan mengundurkan diri sebagai pejabat Bupati (Pj) Mesuji dan digantikan oleh Albar Hasan Tanjung terhitung mulai dari juli 2011 hingga april 2011. Secara umum tugas pokok dari Pj Bupati ini adalah mempersiapkan struktur dan

mekanisme Pemerintahan daerah serta menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi pembentukan DPRD dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitive.

Pada tanggal 13 April 2012, setelah sempat tertunda selama beberapa bulan sejak terbitkannya SK Menteri Dalam Negeri mengenai pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji definitive hasil pilkada 2011 atas nama H. Khamamik. SH dan H. Ismail Ishak, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji ini dilantik oleh Gubernur Lampung di rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tulang Bawang. Kaupaten Tulang Bawang surat keputusan Mendagri RI No.131. 18. 875 tahun 2011 dan surat keputusan Mendagri RI No. 131.18.876. tahun 2011.⁴⁸

1. Sejarah Kabupaten Mesuji

Kabupaten mesuji awalnya merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Tulang Bawang dengan wilayah administratif seluas 7.770,84 Km2. Berdasarkan angka tingkat pertumbuhan penduduk rata – rata sebesar 10 % per tahun, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang pada tahun2010 adalah sebanyak 1. 084. 664 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 jiwa/km2.

Dengan luas wilayah dan besarnya penduduk diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.

⁴⁸ Data Dokumentasi Penelitian 2016, Sumber data : *Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji.*

Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan pemekaran sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat terjangkau dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan derasny arus reformasi yang telah berlangsung dan adanya Peraturan Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah telah mendorong timbulnya aspirasi dan keinginan masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang yaitu wilayah Mesuji untuk membentuk pemerintahan sendiri, terpisah dari pemerintahan Tulang Bawang yang di dasarkan kepada :

1. Terlalu jauhnya rentang kendali Pemerintahan, terutama ke wilayah sekitar bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang.
2. Potensi sumber daya alam yang cukup luas dan sebagai salah satu daerah sentra produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang merupakan sumber bahan pangan dan bahan bakun agro industri di Lampung dan memiliki nilai tambah yang tinggi seta diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan di daerah tersebut.
3. Keinginan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, seta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, h. 78.

Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, Kabupaten Mesuji akhirnya resmi berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang secara yuridis berdiri sejak tanggal 26 November 2008, pada saat undang – undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji ini di dasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitun untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang, memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan secara teknis administratif memenuhi syarat untuk Pembentukan suatu Daerah Otonomi Baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mesuji sebagai daerah otonomi Pemerintahan Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SDM yang sada serta membantu memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mesuji.

Dalam Pembentukan Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang – Undang tersebut, maka ditetapkan ibukota Kabupaten Mesuji adalah wilayah Kecamatan Mesuji, berdasarkan hasil dari musyawarah tokohy tokoh masyarakat makia di tetapkan kampung Wiralaga Mulya Kecamatan Mesujim sebagai Ibukota Kabupaten Mesuji menggunakan prinsip “ Segitiga Emas “ karena lokasi sangat

strategis sebagai jalur yang menghubungkan tiga kecamatan, yakni kecamatan Mesuji sebagai Pusat Pemerintahan.

Kecamatan Mesuji Timur sebagai sentra pertanian dan perikanan yang didukung oleh Kecamatan Rawa Jitu Utara, dimana Kecamatan Mesuji Timur sendiri sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan yang terakhir adalah Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang yang secara geografis dilalui jalan lalu lintas Timur Sumatera, dijadikan sentra perdagangan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Tanjung Raya yang terdapat ditengah – tengah “ Segitiga Emas “ tersebut dengan sendirinya dapat menikmati pembangunan secara langsung atau tidak langsung akibat dari bergerakanya roda Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan serta perdagangan di Kabupaten Mesuji.

Sarana – sarana pendukung pembangunan di Kabupaten Mesuji masih sangat jauh terbelakang jika dibandingkan dengan Kabupaten – kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Salah satu kendala adalah infrastruktur yang kurang memadai yaitu terutama jalan yang sebagian besar masih jalan tanah sehingga waktu hujan aktifitas ekonomi sedikit tersendat karena sulit untuk melalui baik bejalan baik maupun dengan menggunakan kendaraan. Secara admintrasi juga Kabupaten Mesuji ditopang oleh tujuh Kecamatan yaitu :

Tabel 1

No	Nama Kecamatan	Luas (Km2)	Luas Kabupaten (%)	Jumlah Kampung / Desa
1	Mesuji	216,82	9,27	9
2	Tanjung Raya	526,42	22, 50	13
3	Rawajitu Utara	205, 76	8, 80	11

4	Mesuji Timur	970, 23	41, 47	13
5	Simpang Pematang	133, 95	5,73	9
6	Way Serdang	195, 53	8, 35	13
7	Panca Jaya	91, 64	3, 48	7
Jumlah		2.340,15	100	75

Sumber : luas Wilayah dihitung Oleh Topdam II / Sriwijaya Per Juni 2010,

berdasarkan Peta Administrasi Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Mesuji terdiri dari 75 kampung dimana sembilan kampung merupakan pribumi (Kampung : Wiralaga Satu, Wiralaga Dua, Sungai Badak, Sri Tanjung, Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Sungai Cambai, Talang Batu dan Sungai Sidang). Dan 66 kampung merupakan kampung transimigrasi lokal.⁵⁰ Kampung pribumi merupakan kampung perairan yang sebagian besar masyarakat hidup dan bermukim di pinggir sungai Mesuji dengan mata pencarian utama adalah nelayan.

2. Kondisi Geografis dan Demografi

Kabupaten Mesuji secara geografis terletak pada 5 – 6 LS dan 106 – 107 BT, di tinjau dari aspek kewilayahan (*spatial*) posisi Kabupaten Mesuji cukup strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan wilayah sekitarnya. Karena Kabupaten Mesuji merupakan perlintasan yang menghubungkan antara Kabupaten, Kota serta antar Provinsi yang ada wilayah Pulau Sumatera. Secara administrasi Kabupaten Mesuji berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁰ *Ibid, Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Mesuji*

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang seta Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasa dengan Kabupten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Lampung.⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji berada pada jalur poros regional lintas Trans – Sumatera. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan nasional pemerintahan pusat harus memperhatikan dan turut bertanggung jawab dalam pembangunan wilayah Kabupaten Mesuji. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Pulau Sumatera serta RTRW Kabupaten Mesuji, karena merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan sumber energi.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, luas wilayah daratan Kabupaten Mesuji yaitu 234. 015 Ha, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 51. 560 KK. Terdiri dari penduduk laki – laki dan penduduk perempuan yang tersebar di tujuh Kecamatan. Perincian penduduk di wilayah Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵¹ [www. Mesuji Kab.go. id](http://www.MesujiKab.go.id), tanggal 4 April 2016

Tabel 2

No	Nama Kecamatan	Luas (KM 2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Km
1	Mesuji	216, 82	23, 204	107, 01
2	Tanjung Raya	526, 42	33, 898	64, 39
3	Rawa Jitu Utara	205, 76	27, 491	133, 60
4	Mesuji Timur	970, 23	30, 529	31, 46
5	Simpang Pematang	133, 95	23, 106	172, 49
6	Way Serdang	195, 33	46, 245	236, 75
7	Panca Jaya	91, 64	200, 403	85, 63
Jumlah		2, 340,15	200. 403	85,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji 2016.

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji di pengaruhi oleh pertumbuhan alami, penduduk pendatang dan penduduk keluar. Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil bahwa jumlah sebanyak 198.091 jiwa, dan tahun 2010 berjumlah 200. 403 jiwa dengan demikian terjadi pertambahan jumlah penduduk selama kurun waktu 2008- 2009 dengan prosentase rata – rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1, 56% dan kurun waktu 2009 – 2010 rata – rata LPP sebesar 1, 17 %. Lebih jelas mengenai jumlah perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Laju Perkembangnya (%)

No	Kecamatan	Th. 2008	Th. 2009	Th. 2010	Th. 2009	Th. 2010
1	Mesuji	22.524	22. 836	23. 204	1, 30	1, 01
2	Rawajitu Utara	28. 347	27. 201	27. 491	-4, 04	1, 07
3	Way Serdang	41. 997	45. 909	46. 245	9, 37	0, 37
4	Simpang Pematang	25. 888	22. 708	23.106	-12, 28	1, 75
5	Tanjung Raya	33. 307	33. 527	33. 898	0, 66	1, 11

6	Panca Jaya	13. 300	15.682	15. 930	17, 91	1, 58
7	Mesuji Timur	29. 688	30. 228	30. 529	1, 28	1, 00
Kabupaten Mesuji		195. 049	198. 091	200.403	1, 56	1, 17

Sumber: Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Mesuji Tahun 2016

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah Kabupaten Mesuji pada umumnya cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya jumlah murid dan guru. Pada tahun 2008 murid SD atau sederajat sebanyak 25. 971 jiwa (65. 89 %). SLTP atau sederajat sebanyak 10. 374 jiwa (26. 32 %) dan SLTA atau sederajat sebanyak 3. 068 jiwa (7. 78 %). Sedangkan jumlah guru SD dan sederajat sebanyak 1. 247 jiwa (57, 65 %) atau sederajat sebanyak 662 jiwa (30, 61 %), dan SLTA atau sederajat 254 jiwa (11, 74 %).

Topografi wilayah Kabupaten Mesuji terdiri atas lahan kering dan lahan gambut (rawa – rawa). Kepemilikan lahan itu terbagi atas lahan milik masyarakat, tanah negara dan lahan perusahaan. Lahan kering yang ada saat ini sebagian besar sudah ditanami oleh masyarakat dan sebagian lagi di kerjakan oleh perusahaan melalui izin usaha yang di keluarkan oleh Pemerintahan.

Jenis tanaman yang ditanam adalah karet, singkong dan sawit sebagian kecil lagi merupakan tanama palawija dan persawahan. Namun masih ada lahan kering yang merupakan lahan tidur yang tidak berproduksi karena belum dimanfaatkan masyarakat maupun perusahaan. Hasil pendataan dan identifikasi atas lahan kering tersebut, baru 67% lahan yang produktif, sementara sisa lahan sebesar 33% masih belum tergarap.

Lahan gambut ataupun lahan rawa terbentang seluas 98.000 Ha yang berada di Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji

Timur. Lahan gambut atau rawa sangat cocok untuk perkebunan sawit dan palawija. Namun lahan gambut atau lahan rawa itu yang seharusnya cocok untuk beberapa jenis varietas tanaman pertanian dan perkebunan. Hanya dengan 15% saja yang telah berubah menjadi lahan produktif atau dikerjakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan – perusahaan swasta sedangkan 85 % sisanya masih menjadi lahan tidur yang belum digarap.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi alam di Kabupaten Mesuji sangat untuk pengembangan tanaman komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, singkong, kayu akasia dan tanaman aneka buah yang bernilai tinggi. Lahan Pertanian yang telah dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 21. 961 Ha dan yang belum dimanfaatkan seluas 29. 863 Ha. Dalam tahun 2011 Kabupaten Mesuji sudah menunjukkan peningkatan di bidang pertanian dengan hasil – hasil produksi pada 84. 822 ton dibandingkan tahun 2010 hanya sebesar 42. 005 ton.

Di bidang perkebunan, saat ini telah ada tujuh perusahaan besar yang berinvestasi yaitu perusahaan kelapa sawit, karet, akasia dan tepung tapioka. Bahkan beberapa di antaranya juga langsung membuka unit pengolahan *Crude Palm Oilnya* (*CPO*) dengan tanaman perkebunan yang diusahakan. Sektor perindustrian pada Kabupaten Mesuji belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat baik dari jumlah maupun kualitas industri yang di usahakan masyarakat

dalam skala besar maupun masa skala kecil dengan jenis – jenis industri yang di usahakan antara lain : skala besar 3 unit, sedangkan skala kecil 1.099 unit.⁵²

Di samping banyak lahan yang masih kosong, hal ini juga di tunjang dengan keberadaan jalan Lalu Lintas Lampung sebagai akses menuju Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung dan yang ada Sumatera Selatan. Dari pengamatan lapangan, kegiatan industri yang berkembang di wilayah Kabupaten Mesuji berbasis sektor pengolahan hasil perkebunan. Data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji tahun 2010, mencerminkan bahwa terdapat perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang turut serta menggerakan perekonomian baik skala Kabupaten maupun Provinsi, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4
Potensi Dan Pemanfaatan Pengembangan Perkebunan Besar Swasta (PBS)
Di Kabupaten Mesuji

No	Nama Perusahaan PBS	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Plasma Inti
1	PT. Barat Selatan Makmur Investido (PT. BSMI)	9. 513, 75	-	9.513, 75
2	PT. Lampung Inter Pertiwi (LIP)	6. 335, 45	-	6. 335, 45
3	PT. BTLA. Bangun Tata Lampung	10. 386, 75	-	10. 368, 75
4	PT. Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL)	3. 864, 8	3. 864, 8	-
5	PT. BDP (Budi Dwiysta Perkasa)	2. 100	-	2. 100
6	PT. BDP (Budi Dwiyasa)	5. 294, 75	-	5. 294, 75

⁵² Data Dokumentasi Penelitian Maret 2016. Sumber Data : *Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji* Tahun 2016.

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji.

Di bidang perdagangan, aktifitas perdagangan di Kabupaten Mesuji menunjukkan perkembangan pesat sejalan dengan semakin banyaknya sarana prasarana ekonomi di Kabupaten Mesuji seperti pasar yang terdiri dari pertokoan 27 unit, kios 256 dan los 451 unit. Pertokoan tersebut tersebar di pasar Simpang Pematang, pasar Sido Makmur, pasar Adi Luhur, pasar Kota Terpadu Mandiri (KTM), pasar Hanura, pasar Sido Mulyo, dan pasar Panggung Jaya. Pasar – pasar tersebut merupakan gambaran perkembangan perkotaan di Kabupaten Mesuji, maka tepatnya pada tanggal 8 Febuari 2011 dalam kunjungan Gubernur Lampung ke Kabupaten Mesuji sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar modern di Kecamatan Simpang Pematang.

Tenaga kerja yang ada di dalamnya wilayah kerja Kabupaten Mesuji berjumlah 159. 477 orang dan Pegawai Negri Sipil berjumlah 3.811 orang. Sedangkan jumlah rumah tangga transmigrasi adalah sebanyak 890, dengan jumlah jiwa 3. 727 orang. Pada bulan Mei 2011 telah dilaksanakan sertifikasi lahan transmigrasi yang dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, dengan adanya sertifikasi lahan transmigrasi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat sadar “ tertib pertanahan “ dan di harapkan dapat mengurangi konflik lahan yang ada di Kabupaten Mesuji.

Dari lahan yang belum diusahakan maka Kabupaten Mesuji masih terbuka untuk investasi di sektor peternakan, sedangkan populasi ternak yang telah berproduksi diantaranya sapi 16. 070 ekor, kerbau, 969 ekor, kambing 22. 438

ekor, domba 477 ekor, babi 1. 491 ekor, ayam buras 182. 571 ekor ekor. Dari jumlah peternakan diatas semua jenis peternakan telah memproduksi.⁵³

Kabupaten Mesuji sebagai Kabupaten baru, dalam hal perindustrian masih dalam tahap pengembangan. Secara umum industri yang telah adalah diantaranya : industri skala menengah atau besar adalah 8 industri yang bergerak di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan. Sedangkan industri kecil adalah industri kulit 367, industri kayu 143, industri logam 12, industri anyaman 159, industri gerabah 34, industri makanan dan minuman 142.

Potensi pendapatan daerah di Kabupaten Mesuji sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Saat ini Dinas – dinas Kabupaten Mesuji sedang merancang peraturan daerah untuk penggalihan potensi daerah. Pada tahun Anggaran 2010 PADS Kabupaten Mesuji adalah 2. 516, 150. 000- dan pada tahun 2011 Pemerintahan Kabupaten Mesuji menargetkan PADS sebesar Rp. 2. 451, 600. 000 dari APBD Rp.400. 738, 345. 300-

Menjadi Kabupaten yang baru, Mesuji tentunya dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk sarana Pemerintahan itu sendiri, sebagian besar gedung kantor satuan kerja perangkat daerah masih menyewa bangunan dan rumah – rumah milik penduduk. Sedangkan sebagian lainnya merupakan gedung kantor peninggalan Kabupaten induk. Sementara aset – aset yang lain seperti kendaraan dinas, gedung kantor, tanah, dan lain – lainnya merupakan aset yang

⁵³ Data Dokumentasi Penelitian 2016, Sumber Data : *Dinas Peternakan Kabupaten Mesuji tahun 2016.*

masih menjadi milik Kabupaten Induk dan dalam proses pengalihan aset ke Kabupaten baru.

Dilihat dari keberadaan sarana kesehatan, Kabupaten Mesuji hanya memiliki 9 unit puskesmas yang tersebar di 7 Kecamatan dengan jumlah tenaga dokter sebanyak 14 orang dan paramedis sebanyak 154 orang. Kabupaten ini belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan rawat inap dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Induk atau bahkan di Kabupaten lain dan Ibukota Provinsi yaitu Bandar Lampung.

B. Sejarah Semboyan Hidup Mesuji

Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang akan mempunyai semboyan yang baru. Perubahan yang signifikan pada lambang yang baru akan karena telah menghilangnya gambar pohon kelapa sawit dan pohon karet. Serta semboyan Sai Bumi Serasan Segawe akan berubah menjadi Bumi Ragab Begawe Caram. Semboyan Bumi Ragab Begawe Caram yang terbaru ini telah di ambil dari suatu bahasa mesuji yang mempunyai makna dan arti Kabupaten Mesuji yang telah di huni ataupun di tempat tinggal oleh seluruh rakyat yang telah bekerja cepat, damai, dalam suatu kebersamaan yang bersifat gotong royong.

Dengan dibentuknya semboyan baru ini telah adanya melalui persetujuan bersama antara pemerintahan Kabupaten Mesuji ini dengan persetujuan dari pihak DPRD Kabupaten Mesuji. Dengan sebuah rancangan sebuah peraturan daerah tentang suatu perubahan peraturan daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun

2011 tentang lambang daerah. Dengan beserta sembilan yang telah digelar di sebuah ruang sidang paripurna DPRD Mesuji di tempat Gedung Ram.

Pergantian semboyan ini muncul karena adanya persetujuan atau usulan – usulan dari berbagai tokoh – tokoh masyarakat Mesuji dan menyesuaikan dengan kearifan lokal atau kerukunan yang lokal di Kabupaten Mesuji. Maka selanjutnya akan dilakukan sebuah evaluasi sebelum akan disahkannya menjadi peraturan suatu daerah setempat.

Semoga dengan adanya sebuah perubahan lambang dan semboyan Kabupaten Mesuji yang baru ini di harapkan dapat mewakili suatu kondisi – kondisi di Kabupaten Mesuji yang telah ada yang sesuai dengan potensi dan dengan sebuah keaneragaman budaya, sosial dan kekayaan alamnya. Serta membuat semua masyarakat yang bertempat tinggal Kabupaten Mesuji akan menjadi akur, damai, tentram serta dapat hidup berdampingan yang harmonis dan saling tolong – menolong dalam suatu hal apapun.

Tidak saling bentrok dan bermusuhan sehingga menimbulkan suatu masalah yang ada di Kabupaten Mesuji yang bisa menghilangkan nyawa masyarakat yang di Kabupaten Mesuji. Dengan terbentuknya sebuah semboyan Kabupaten Mesuji yang baru ini karena adanya sebuah usulan – usulan dan dari koreksi – koreksi dari para tokoh – tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Mesuji dan merupakan dari sebuah kajian – kajian dari berbagai para anggota DPRD di Kabupaten Mesuji.

Alasannya di ubahnya semboyan Kabupaten Mesuji karena semboyan Kabupaten Mesuji yang lama telah dikoreksi terdapat di sebuah gambar pohon

sawit. Karena menurut para tokoh – tokoh masyarakat yang di Kabupaten Mesuji itu tidak bisa untuk dijadikan sebuah lambang karena sifatnya sebuah pohon kelapa sawit itu sifatnya berubah – ubah.

Misalnya jika dikemudian hari ataupun ada masa yang akan datang ketika sebuah pohon sawit dan pohon karet suatu tiada lagi ataupun sudah tidak dibudi dayakan lagi di daerah Kabupaten Mesuji maka hal itu pun akan relevan lagi maka dari itu di adakannya sebuah perumusan untuk perubahan sebuah semboyan yang baru di Kabupaten Mesuji dari hasil para tokoh – tokoh masyarakat Kabupaten Mesuji ini maka telah disepakati dan disahkan secepatnya semboyan Kabupaten Mesuji yang baru ini akan digunakan dan akan di jadikan semboyan yang akan dipakai seutuhnya oleh masyarakat yang ada Kabupaten Mesuji.

C. Anggota DPRD Kabupaten Mesuji

Sebanyak 35 orang anggota DPRD Kabupaten Mesuji periode 2014- 2019 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala. Di lapangan Tennis Sekretariat Daerah Mesuji. Para anggota DPRD di lantik di gedung DPRD karena Gedung DPRD Mesuji memang belum selesai dibangun.

Turut hadir dalam pelantikan yang digelar dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mesuji antara lain Bupati Mesuji, Danlanud Astra Kestra, Dandim 0426 Tulang Bawang, Kapolres Mesuji dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten lainnya. Selain itu hadir pula para pejabat struktural di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mesuji dan Tokoh – tokoh masyarakat, dengan pengamanan tekat dari anggota TNI dan Polri.

Dalam sambutannya Bupati Mesuji mengucapkan selamat kepada para Anggota DPRD Kabupaten Mesuji masa jabatan 2014 – 2019 yang dilantik harapannya Anggota DPRD Kabupaten Mesuji yang baru dilantik untuk senantiasa bekerja sama dalam menyukseskan seluruh program – program pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintahan Kabupaten Mesuji.

Untuk Anggota DPRD periode 2009- 2014 saya ucapkan ribuan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2004. Setiap Anggota DPRD yang telah berakhir periode jabatannya akan diberikan uang jasa pengabdian. Pada kesempatannya itu Bupati Kabupaten Mesuji juga menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Mesuji di bawah kepemimpinnya dengan berbagai program yang sedang akan dikerjakan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Mesuji saat ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, saluran pengairan, membuka daerah terisolir, dan sarana transportasi. Saat ini Pemerintahan Kabupaten Mesuji menjadi salah satu Kabupaten yang mendapat predikat terbaik dalam pembangunan infrastruktur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji akhirnya menetapkan anggota DPRD Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2019 berikut ini anggota DPRD Kabupaten Mesuji Periode 2014 – 2019.

Tabel 5
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai Nasdem

No.	Nama	Suara
1.	Heri Purwanto. SE	3156

2.	H. Sumanto Andrias	1068
3.	Mustawi A. Ma	1790
4.	Fuad Amrullo. SE	1584
5.	Darmaji	992
6.	Idrus Topik	2033
7.	Deddy Irawan	708
8.	Buyung Darmawan	1881

Tabel 6
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai PDIP

No.	Nama	Suara
1.	Drs. Musholi	514
2.	Mego	624
3.	Abdul Hamid	773
4.	Bob Nasution	1261
5.	Arwin	1038
6.	Edy Sucipto	720

Tabel 7
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai Golkar

No.	Nama	Suara
1.	Tri Isyani	1018
2.	Joko Prayito, SE	988
3.	Haryati Candra Lela	829
4.	Parsuki	1379

Tabel 8
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai PKS

No.	Nama	Suara
1.	Eddy Sandani, Spd	511
2.	Maulani	1061

Tabel 9
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai Gerindra

No.	Nama	Suara
1.	Iwan Setiawan	1411

2.	Suyadi	1037
3.	Rulyana, SE	1097
4.	Nurwasis	807

Tabel 10
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai PAN

No.	Nama	Suara
1.	Agus Setyo, SE	755
2.	Supriyanto	1691
3.	Nuryadi Haryono	785
4.	Mat Nur	3128

Tabel 11
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai Demokrat

No.	Nama	Suara
1.	Cikusin	924
2.	Mukhtar	908
3.	Weli Apriyani	1302
4.	Suharianto	565

Tabel 12
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai Hanura

No.	Nama	Suara
1.	Faisal. SH	528

Tabel 13
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
Partai Gerindra

No.	Nama	Suara
1.	Yuliani Rahmi Safitri	322

D. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD

Tugas dan wewenang anggota DPRD sesuai isi Pasal, Pasal 334 UU Nomor

27 Tahun 2009 ialah:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tugas anggota DPRD adalah untuk

menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004.

Pada dasarnya fungsi dan tugas konstitusionalnya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi dan tugas konstitusional :

1. Fungsi legislasi, yakni menyusun peraturan-peraturan daerah baik dengan inisiatif mandiri ataupun bersama Pemda.
 2. Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBD, dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
 3. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Perda dan Keputusan Kepala Daerah untuk memastikan berjalannya peraturan yang ada dalam kerangka optimalnya kinerja pemerintah daerah.
- Diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah, Pemda dan anggota DPRD dapat mewujudkan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif guna roda pemerintahan daerah agar berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam era reformasi. dapat memberikan kebijakan yang jelas terhadap masyarakat.

Eksistensi anggota DPRD di era otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan terhadap Pemerintah Daerah dengan cara menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Menurut Riswandha, 2001 Sebagai sebuah institusi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 6 (enam) fungsi dasar, yakni :

1. Fungsi Perwakilan Rakyat, fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulator aspirasi masyarakat. anggota DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.
2. Fungsi Legislasi, fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kualitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
3. Fungsi Legislative Review, fungsi ini berhubungan dengan upaya menilai kembali semua produk politik yang secara umum dirasakan mengusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan:
 - a) Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak
 - b) Memebatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL.
 - c) Megakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alam, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi lapangan golf.
4. Fungsi Pengawasan, fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah

dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.

5. Fungsi Anggaran, fungsi ini berkaitan dengan kemampuan anggota DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
6. Fungsi Pengaturan Politik, melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk:
 - a) Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingkat masyarakat
 - b) Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah.



BAB IV
ANALISA
IMPLEMENTASI SEMBOYAN HIDUP DI KABUPATEN MESUJI
OLEH ANGGOTA DPRD

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Semboyan Hidup Masyarakat Mesuji

Masyarakat Kabupaten Mesuji mengetahui bahwa dalam sebuah kabupaten memiliki sebuah semboyan ataupun slogan yang menjadi cita – cita, maka masyarakat mesuji telah paham bahwa semboyan hidup masyarakat yang ada di mesuji adalah Bumi Ragab Caram yang memiliki makna tempat tinggal oleh seluruh rakyat yang telah bekerja cepat, damai, dalam suatu kebersamaan yang bersifat gotong royong.

Dalam hal menjaga dan melaksanakan semboyan hidup masyarakat mesuji tersebut masyarakat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengsosialisasikan dan menjaga semboyan yang telah ada di Kabupaten Mesuji. Semboyan Kabupaten Mesuji yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah, diharapkan mampu untuk menjadi pegangan dan ciri khas Kabupaten Mesuji.

Pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup masyarakat yang ada dimesuji menurut penulis masih kurang. Hal tersebut di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang semboyan hidup tersebut. Semboyan hidup yang awalnya berbunyi Sai Bumi Serasan Segawe telah diubah menjadi Bumi Ragab Begawe Caram yang belum banyak diketahui oleh masyarakat mesuji pada saat ini.

Sebagian dari masyarakat kabupaten mesuji mengetahui tentang semboyan hidup yang telah diubah namun sebagian yang lainnya tidak mengetahui bahkan ada yang tak mengenal semboyan hidup tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan informasi yang diterima oleh masyarakat di kabupaten mesuji. Sehingga semboyan yang harusnya menjadi sebuah cita – cita suatu daerah tersebut tidak dapat dimaknai dengan baik oleh sebagian masyarakat mesuji.

Berdasarkan pengamatan peneliti pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup masyarakat mesuji masih kurang, semboyan daerah yang seharusnya di junjung tinggi menjadi sebuah pedoman atau cita – cita suatu daerah tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Kurangnya pendekatan pemerintah daerah tentang peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 yaitu lambang daerah juga pun bisa menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup yang telah ada.

Kesadaran masyarakat akan adanya semboyan hidup yang menjadi pedoman suatu daerah merupakan tolak ukur majunya suatu daerah, karena ketika masyarakat paham akan semboyan hidup yang telah ditetapkan maka masyarakat akan mengimplementasikan semboyan tersebut kedalam kehidupan sehari – sehari. Jika semboyan hidup telah diimplementasikan kedalam kehidupan sehari – hari maka daerah tersebut telah mampu mencapai cita – cita sesuai dengan semboyan yang menggambarkan daerah tersebut.

Dengan bergantinya semboyan hidup masyarakat Mesuji, itu artinya Kabupaten Mesuji ingin menuju kearah yang lebih baik dalam artian sejahterah,

nyaman, dan berdaulat dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Sudah banyak Langkah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Mesuji untuk memberikan dan mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung pada semboyan hidup Kabupaten Mesuji yang sekarang. Dalam hal ini peran yang sangat penting adalah masyarakat Mesuji harus memiliki rasa peduli terhadap daerah sendiri, peran dari putra/putri daerah Mesuji sebagai kunci utama bagi terealisasinya nilai-nilai yang terkandung pada semboyan hidup masyarakat Mesuji.

Kemajuan kabupaten Mesuji saat ini bukan dikarenakan pemerintahan yang baik saja, namun rasa cinta terhadap daerah asal itu yang menjadi tonggak utama. Namun kemajuan daerah tak luput juga dari tujuan hidup yang baik seperti halnya semboyan hidup. Peran aparatur sipil negara, anggota dewan, pemuda daerah, inilah alat dari suksesnya kemajuan suatu daerah, apalagi dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dan modern, adat dan budaya suatu daerah akan hilang jikalau masyarakat acuh dengan keadaan sekitarnya didaerahnya.

Saat ini masyarakat Mesuji sedang dalam tahap proses adaptasi dan belajar untuk memahami semboyan hidup yang baru, yang diharapkan untuk hal ini kedepannya masyarakat agar lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan hidup yang baru. Agar masyarakat Mesuji memiliki pribadi dan karakter daerah yang baik untuk kemajuan masyarakat yang cerdas dan berdaulat.

Diharapkan untuk masyarakat yang ada di kabupaten Mesuji ikut mengimplementasikan dan ikut andil dalam memperbaiki baik di berbagai

kegiatan yang ada dikabupaten Mesuji terutama masyarakat Mesuji dan Anggota DPRD.

B. Implementasi Semboyan Mesuji Oleh Anggota DPRD Kabupaten Mesuji

Semboyan dalam KBBI adalah kalimat minor atau lengkap yang terjadi dari frase atau klausa yang disukai oleh suatu kelompok masyarakat, dan juga kata-kata atau kalimat pendek yang dipakai untuk membangkitkan semangat dan merupakan ciri khas dari pemilik semboyan yang bersangkutan.

Semboyan merupakan suatu falsafah hidup bagi setiap warga masyarakat yang mendiami suatu wilayah teritorialnya. Baik setiap Negara, Provinsi ataupun Pemerintahan daerah memiliki semboyan hidup untuk pegangan dan menjunjung tinggi suatu identitas suatu daerah.

Kabupaten Mesuji adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki semboyan hidup dan menjunjung tinggi identitas suatu daerahnya. Semboyan Kabupaten Mesuji pada awalnya berbunyi Sai Bumi Serasan Segawe yang memiliki makna daerah yang dihuni oleh masyarakat yang damai dalam kebersamaan dan gotong royong. Namun pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan perubahan pada lambang daerah pada saat ini.

Perubahan yang dilakukan pada lambang atau semboyan Kabupaten Mesuji disetujui oleh Pemkab Mesuji dan DPRD setempat atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah. Hilangnya gambar pohon kelapa sawit dan pohon karet, serta berubahnya semboyan Kabupaten Mesuji

yang awalnya Sai Bumi Serasan Segawe menjadi Bumi Ragab Begawe Caram ini disetujui pada saat rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan bersama Raperda Kabupaten Mesuji di ruang sidang paripurna DPRD, Gedung Ram.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi cermin dan contoh untuk masyarakat yang telah memilihnya untuk menjadi wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengimplementasikan kewenangan ataupun peraturan daerah yang telah disepakati seperti halnya dalam penelitian ini adalah tentang semboyan hidup.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang implementasi kebijakan anggota DPRD tentang semboyan hidup masyarakat mesuji ditinjau dari fungsinya. DPRD memiliki Fungsi sebagai legislator, anggaran dan pengawasan sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1. Legislator

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi sebagai legislator yang menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi – aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan hal lainnya, dengan demikian berdasarkan hasil analisis peneliti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai legislator apabila anggota DPRD Kabupaten Mesuji ikut mengimplementasikan Semboyan Hidup Masyarakat Mesuji demi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Anggota Dewan yaitu Eddy Sandani yang mana merupakan anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beliau merupakan putra asli Masyarakat mesuji.

Menurut Eddy Sandani, Semboyan ini di harapkan untuk masyarakat mesuji agar bekerja sama dan gotong royong satu sama lain. Maka kita harus bersama-sama mengimplementasikan semboyan ini dalam hidup kita. Agar tetap menjadi ciri khas daerah dan mampu membangkitkan semangat kita untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah sesuai dengan semboyan yang telah berlaku. Saya selaku Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, harus terus ikut campur dalam mengimplementasi semboyan hidup masyarakat mesuji yang mana anggota dewan itu sendiri sangat berkaitan dengan semboyan dimana semboyan itu sendiri disahkan oleh anggota dewan. Dengan mengadakan pendekatan terhadap pemudah seperti kelompok karang taruna dengan mengadakan gotong royong bersama untuk memperbaiki fasilitas - fasilitas umum yang ada di sekitaran mereka dan juga mengadakan kunjungan ke sekolah dengan tujuan agar mereka mengerti sejak usia dini agar harapan ke depan nya agar mereka bisa lebih paham dan bisa menerapkan apa yang telah menjadi tujuan dari semboyan tersebut

Salah satu Anggota DPRD yang ikut mengimplementasikan semboyan mesuji dari juga dari praksi partai PDI Perjuangan yang bernama Bob Nasution beliau merupakan putra asli mesuji karena dengan semboyan yang baru diharapkan kepada anggota DPRD yang ada di Kabupaten ikut serta membangun

mesuji yang lebih baik lagi yang sebelumnya yang semboyang tersebut mengutamakan kerja sama dan gotong royong satu lain baik dalam pemerintahan daerah maupun diluar pemerintahan daerah.

2. Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten mesuji dalam fungsinya sebagai mendistribusikan sumber daya lokal termasuk anggaran yang berbentuk angka menurut penulis belum cukup sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Dapat terlihat dari sarana dan prasarana di kabupaten mesuji yang belum cukup memadai. Jalan besar yang seharusnya menjadi tempat transportasi masyarakat mesuji tidak layak untuk dilewati, masih banyak jalan yang berlubang bahkan berlumpur yang dapat menghambat transportasi di kabupaten mesuji.

Namun, pengimplementasian anggota DPRD terhadap semboyan hidup masyarakat mesuji tidak dapat dilihat dari segi sarana dan prasarananya saja, bisa juga dilihat dari segi industri dan ekonomi. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan salah satu anggota DPRD yang bernama Weli Apriyani beliau ikut mengimplementasikan dan mensosialisasikan semboyan masyarakat mesuji beliau selaku masyarakat mesuji beliau mengadakan acara penyuluhan terhadap kalangan ibu-ibu di sektor pengembangan usaha kelompok rumahan dengan memanfaatkan sumber daya yang bisa berguna dan bernilai ekonomi yang ada di kabupaten mesuji sehingga dapat memberikan kegiatan yang bisa bermanfaat, beliau juga mengadakan pelatihan untuk membuat karya tangan dengan memanfaatkan barang barang bekas.

3. Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya. Dalam penelitian ini ditinjau dari fungsi pengawasannya anggota DPRD kabupaten Mesuji tidak hanya mengawasi apakah kebijakan peraturan daerah tentang Semboyan Hidup yang berbunyi Bumi Ragab Begawi Caram telah di implementasikan oleh masyarakat, namun Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Juga harus ikut mengimplementasikannya, karena secara normatif sebagai cerminan dalam pemerintah daerah anggota DPRD Kabupaten Mesuji harapannya menjadi contoh dan juga pelaksana agar terdapat keseimbangan dalam menjunjung tinggi Semboyan Hidup Kabupaten Mesuji demi cita – cita Kabupaten Mesuji yang diinginkan melalui Semboyan Hidup tersebut tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di dapatkan bahwa dalam fungsi ini Ketua Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh juga ikut mengimplementasikan semboyan hidup mesuji mengajak dan menghimbau kepada semua anggota DPRD yang ada di daerah mesuji baik dalam Pemerintahan Daerah maupun diluar pemerintahan ikut serta mengimplemantasikan semboyan tersebut yang semboyan mesuji tersebut mengutamakan kerja sama dan gotong royong dan memberikan hal – hal bermanfaat bagi seluruh anggota DPRD yang ada di Kabupaten Mesuji.

Anggota dewan yang tidak ikut dalam mengimplementasikan semboyan hidup masyarakat mesuji dalam fungsi pengawasan adalah Faisal yang mana

beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Fraksi Partai Hatanurani Rakyat (HANURA). Semboyan ini di harapkan untuk masyarakat mesuji agar bekerja sama dan gotong royong satu sama lain. Akan tetapi saya belum bisa mengimplementasi dalam hidup saya karena saya mengatasnamakan partai politik dan AD/ ART Partai dan janji – janji saya ketika mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mesuji. Anggota Dewan sepenuhnya milik partai dan tidak ikut campur dalam mengimplementasi semboyan hidup masyarakat mesuji yang mana anggota dewan itu sendiri sangat berkaitan dengan semboyan dimana semboyan itu sendiri disahkan oleh anggota dewan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa :

1. Pemahaman masyarakat tentang semboyan hidup masyarakat yang ada dimesuji masih kurang. Hal tersebut di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang semboyan hidup tersebut. Semboyan hidup yang awalnya berbunyi Sai Bumi Serasan Segawe telah diubah menjadi Bumi Ragab Begawe Caram yang belum banyak diketahui oleh masyarakat mesuji pada saat ini.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai legislator apabila anggota DPRD Kabupaten Mesuji ikut mengimplementasikan Semboyan Hidup Masyarakat Mesuji demi kesejahteraan masyarakat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten mesuji dalam fungsinya sebagai mendistribusikan sumber daya lokal termasuk anggaran yang berbentuk angka menurut penulis belum cukup sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
4. Dalam fungsi pengawasannya anggota DPRD kabupaten Mesuji tidak hanya mengawasi apakah kebijakan peraturan daerah tentang Semboyan Hidup yang ada telah di implementasikan oleh masyarakat, namun Anggota DPRD Kabupaten Mesuji juga sudah ikut mengimplementasikannya.

B. SARAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan :

1. Seharusnya pemerintahan daerah (DPRD) ikut andil dalam mengimplementasikan semboyan hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Mesuji.
2. Untuk para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Mesuji agar memperbaiki komunikasi oleh pemerintahan daerah mengenai pengimplementasian semboyan hidup yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas dan mengkaji kembali penelitian yang terkait implementasi semboyan hidup. Selain itu dapat pula ditambahkan variabel dan item lain dalam penelitian selanjutnya.
4. Masyarakat harus mengerti arti dan makna dari semboyan hidup masyarakat yang di Kabupaten Mesuji yaitu BUMI RAGAB BEGAWE CARAM dan bersama dalam mengimplementasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*.

Jakarta : Bukubeta, 2010.

Agustino. *Implementasi Kebijakan Politik*. Jakarta : Bukubeta, 2006.

Al Marsudi Subandi. *Pancasila Dan UUD Paradigma Reformasi*. Surabaya : Rajawali Pers, 2006.

Bartoven Vivit Nurdin. *Etnografi Marga Mesuji*. 2012.

Data Dokumentasi Penelitian 2016, Sumber Data : *Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji*

Data Dokumentasi Penelitian Maret 2016. Sumber Data : *Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mesuji Tahun 2016*.

Data Dokumentasi Penelitian 2016, Sumber Data : *Dinas Peternakan Kabupaten Mesuji Tahun 2016*

Data KPU *Tentang Pileg Kabupaten Mesuji Tahun 2014- 2019*

Estiningsih Muji. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

Effendi, Sofian, Masri Dan Singarudin, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka Indonesia Jakarta

Fathoni Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Franklin, Grace A, Rendal B, Ripley, *Policy Implementation And Bureauracy*
Second Edition The Dorsey Press, Chicago – Iiionis, 1986.

Hamka Buya. *Falsafah Hidup*. Yogyakarta : Gema Insani Press,
1997.

Hasan Iqbal M. *Pokok – Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*,. Bogor :
Ghalia Indonesia, 2002.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research : Jilid 2*. Yogyakarta: Andi
Offest, 2004.

HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka*
Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Irawan Prasatya, *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta :
Setiawan Press, 1999.

Marbun Nachot Benedictus, *DPRD Dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen*
UUD 1945 Dan Otonomi Daerah 2004

Nabawi Hadar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gama Press, 1987.

Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Ed – Cet 2.

R. Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo, 1992.

Rusyan Tabrani. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2005.

Sagala Syaiful. *Manajemen Strategis Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*.
Bandung : Alfabeta, 2009.

Setiawan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Admintrasi*. Bandung : Alfabeta, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo, 2002.

Wasistono Sadu. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung : Fokusmedi, 2009.

Yein. K. Robert, *Studi Kasus Desain Metode*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.



